

Working Together for Global Development and a Common Future



FORUM PEMBANGUNAN GLOBAL TONGZHOU DI BEIJING

Adrian Nastase, mantan Perdana Menteri Rumania, menyampaikan pidato di Forum Pembangunan Global Tongzhou di Beijing, Tiongkok, Sabtu (18/11). Acara yang berlangsung dua hari tersebut diselenggarakan oleh Universitas Renmin Tiongkok (RUC) dan diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Rakyat Distrik Tongzhou, mengumpulkan lebih dari 400 peserta dari lebih dari 30 negara dari seluruh dunia.

WHO: Kondisi RS Al-Shifa Seperti Zona Kematian

Rumah sakit tersebut tidak berfungsi sebagai fasilitas medis karena kelangkaan air bersih, bahan bakar, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya.

GAZA(IM) - Kondisi Rumah Sakit Al Shifa di Gaza utara sangat memprihatinkan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkannya sebagai zona kematian. Sebuah tim yang dipimpin WHO mengunjungi RS Al Shifa pada Sabtu (18/11). Mereka terdiri dari para ahli kesehatan masyarakat, petugas logistik, dan staf keamanan dari berbagai departemen PBB.

Tim tersebut menghabiskan waktu selama stau jam di dalam rumah sakit karena masalah keamanan. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (19/11), WHO menggambarkan RS Al Shifa sebagai zona kematian. Rumah sakit tersebut tidak berfungsi sebagai fasilitas medis karena kelangkaan air bersih, bahan bakar, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya.

"Tanda-tanda penembakan dan tembakan terlihat jelas. Tim melihat kuburan massal di pintu masuk rumah sakit dan diberitahu bahwa lebih dari 80 orang dimakamkan di sana," kata WHO, seperti dikutip Reuters.

Lorong-lorong dan halaman rumah sakit dipenuhi dengan limbah medis dan padat. Sementara pasien serta staf kesehatan menyatakan ketakutannya terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.

WHO mencatat terdapat 25 petugas kesehatan dan 291 pasien, termasuk 32 bayi dalam kondisi kritis, yang masih berada di Al Shifa. "WHO dan mitranya segera mengembangkan rencana untuk segera mengevakuasi pasien yang tersisa, staf dan keluarga mereka," lanjut pernyataan tersebut.

Militer Israel tidak segera mengomentari pernyataan WHO atau kunjungan tersebut. Sebelumnya, Netanyahu mengakui gagal meminimalkan kematian. Menurutnya, Israel berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan warga sipil dari bahaya saat memerangi Hamas di Gaza, termasuk menajutkan sebaran yang memperingatkan mereka untuk melarikan diri, namun upaya meminimalkan korban jiwa tidak berhasil.

"Setiap kematian warga

sipil adalah sebuah tragedi. Dan kami seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena kami melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan warga sipil dari bahaya, sementara Hamas melakukan segalanya untuk membuat mereka berada dalam bahaya," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis (16/11), dalam wawancaranya dengan CBS News.

Netanyahu juga mengklaim tujuan kampanye militernya adalah menghancurkan Hamas. "Hal lain yang bisa saya katakan adalah kami berusaha menyelesaikan pekerjaan ini dengan meminimalkan korban sipil. Itulah yang kami coba lakukan, meminimalkan korban sipil. Namun, sayangnya, kami tidak berhasil," ujar Netanyahu yang punya panggilan Bibi.

Warga sipil Palestina di Jalur Gaza menanggung beban terberat dari kampanye militer Israel sejak 7 Oktober, di mana pada hari itu serangan Hamas ke Israel selatan menewaskan setidaknya 1.200 orang dan lebih dari 200 orang disandera. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina yang berkedudukan di Tepi Barat menyatakan bahwa setidaknya 11.470 warga Gaza tewas akibat serangan balasan Israel sejak 7 Oktober. Adapun 4.707 di antaranya adalah anak-anak.

Pada Kamis, Angkatan Udara Israel menyebarkan sebaran di empat wilayah di Khan Younis, Gaza selatan, yang isinya meminta masyarakat mengungsi demi keselamatan mereka sendiri. Empat wilayah yang dimaksud adalah Khuzaa, Abassan, Bani Suhaila, dan Al Qarara.

Israel sebelumnya juga menggunakan sebaran di Gaza utara untuk memaksa warga sipil menyingkir, memicu pengungsian massal yang dikhawatirkan oleh banyak warga Palestina akan menjadi permanen. Fenomena eksodus ini membawa ingatan banyak orang pada peristiwa Nakba.

Netanyahu mengatakan ada indikasi kuat bahwa sandera yang ditahan Hamas berada di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, namun mereka sudah tidak ada lagi ketika militer Israel melancarkan operasi darat di sana awal pekan ini.

"Kami mendapat indikasi kuat bahwa mereka ditahan di Rumah Sakit Al-Shifa, yang merupakan salah satu alasan kami masuk ke rumah sakit tersebut," kata Netanyahu. Netanyahu mengklaim pemerintahannya memiliki informasi intelijen mengenai para sandera, namun menolak memberikan penjelasan lebih spesifik. "Semakin sedikit saya mengatakannya, semakin baik," tutur dia.

Israel juga menuduh

Hamas memiliki pusat komando di bawah Rumah Sakit Al-Shifa, namun Hamas telah berulang kali membantah tuduhan itu. Dari sekitar 240 orang yang disandera Hamas, sejauh ini empat orang telah dibebaskan.

Sementara itu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berusaha kembali menduduki Gaza.

"Kami menginginkan tanggung jawab militer secara keseluruhan untuk mencegah munculnya kembali teror," kata dia.

"Kami tidak bermaksud melakukan pendudukan. Itu bukan tujuan kami. Namun, tujuan kami adalah memastikan apa yang terjadi di sana berbeda. Untuk melakukan hal tersebut, kami harus men-demilitarisasi Gaza dan melakukan deradikalisasi di Gaza," tambahnya.

"Sama seperti Anda harus memiliki masa depan yang berbeda setelah penaklukan Jerman, Anda melakukan de-radikalisasi, de-nazifikasi Jerman," ujarnya.

"Ada perubahan budaya. Kita memerlukan perubahan budaya di sini. Kita tidak bisa membiarkan pemerintahan sipil memasuki Gaza tanpa memerangi teroris, berkomitmen untuk mendanai teroris dan bukan memerangi teroris," katanya. ● tom

Bertemu Presiden Mesir, Komisi Eropa Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

MESIR(IM) - Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Kairo untuk membahas situasi kemanusiaan di Gaza. Kedua pihak mengukuhkan kesepakatan prinsip tidak ada pemindahan paksa warga Palestina.

Pertemuan itu dilakukan pada hari Sabtu, (18/11) di Kairo, Mesir. Dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut, Von der Leyen mengatakan kedua pihak menyepakati prinsip tidak ada pemindahan paksa bagi warga

Palestina. "Kami menyetujui prinsip tidak ada pemindahan paksa warga Palestina dan politik berdasarkan 'solusi dua negara'," kata Leyen, dikutip dari Anadolu Agensi, Minggu (19/11).

Selain itu, Leyen juga berterima kasih kepada Mesir "atas peran pentingnya dalam menyediakan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang rentan".

Diketahui jalur Gaza telah dilanda krisis kemanusiaan sejak bulan lalu, ketika Israel melancarkan serangan dan

memberlakukan blokade skala penuh.

PBB memperkirakan setidaknya 1,5 juta orang di Gaza menjadi pengungsi internal. Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, juga rusak atau hancur.

Sebelumnya, Israel telah menentang seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata, dengan mengatakan tidak akan ada gencatan senjata kecuali semua sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan mendadak bulan lalu dikembalikan. ● ans



PEMERINTAH AFSEL DESAK WARGANYA UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Pemerintah Afrika Selatan meminta warganya mendaftar jadi pemilih untuk Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Independen (IEC) Afrika Selatan mendaftarkan warga (yang belum terdaftar) yang pada pekan terakhir pendaftaran (18 dan 19 November). Tampak dalam foto masyarakat mendaftar di tempat pemungutan suara di Soweto, Johannesburg, AfSel.

Pakistan Usir 1,3 Juta Warga Afghanistan yang Tinggal Secara Ilegal

ISLAMABAD (IM) - Sekitar 1,3 juta warga Afghanistan diperkirakan akan pergi dari Pakistan ke negara asalnya. Kekhawatiran ini muncul usai beberapa minggu pihak berwenang Pakistan mulai mengusir orang asing yang tinggal di negara itu secara ilegal.

Peringatan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) muncul di tengah pengusiran tersebut. Padahal cuaca dingin mulai terjadi dan kritik luas dari kelompok hak asasi manusia internasional dan domestik.

Sejak 1 November, polisi di Pakistan telah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memeriksa dokumen para migran. Mereka yang melewati batas waktu dan tidak memiliki surat-surat diminta untuk pergi atau ditangkap. Kebanyakan dari mereka yang terkena dampak adalah warga negara Afghanistan.

Pakistan menampung jutaan warga Afghanistan yang meninggalkan negaranya selama pendudukan Uni Soviet pada 1979-1989. Jumlahnya membengkak setelah Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021. Diperkirakan 1,7 juta warga Afghanistan tinggal di Pakistan secara ilegal ketika tindakan keras tersebut dilancarkan.

Pemerintah Pakistan mengatakan, 1,4 juta warga Afghanistan yang terdaftar sebagai pengungsi tidak perlu khawatir, karena status mereka telah diperpanjang hingga Desember. Namun, tindakan keras yang dilakukan petugas keamanan telah memaksa sekitar 340 ribu warga Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir meninggalkan Pakistan setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun.

Banyak warga Afghanistan yang telah berada di Pakistan selama beberapa dekade mengatakan, mereka harus diberi lebih banyak waktu. Mereka mengaku tidak memiliki rumah di Afghanistan dan tidak tahu cara memulai hidup baru dari awal lagi di Afghanistan.

Afghanistan pun telah membentuk komisi di Kabul untuk menangani repatriasi dari Pakistan. Juru bicara komisi pengungsi pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Taliban Bilal Karimi mengatakan, sejauh ini 340.608 warga Afghanistan telah kembali.

Saat ini, WHO menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga Afghanistan yang kembali melalui perbatasan di Turk-

ham di barat laut Pakistan dan Chaman di barat daya. "Fluktuasi pengungsi yang kembali secara tiba-tiba dan meningkat, serta faktor-faktor terkait lainnya, menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan," ujar badan PBB itu.

Laporan WHO memperingatkan risiko wabah penyakit dan penularan virus polio liar di titik-titik masuknya warga Afghanistan ke negara tersebut. Badan itu juga meminta dana sebesar 10 juta dolar AS untuk menyediakan layanan kesehatan yang menargetkan 700 ribu warga Afghanistan yang kembali.

"Saat kita menyambut kembali warga Afghanistan ke negara ini, merupakan kewajiban kita bersama terhadap kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa kita memiliki sistem dan sumber daya untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespons risiko kesehatan masyarakat," kata Perwakilan WHO di Afghanistan Dapeng Luo.

Perkembangan terakhir ini juga terjadi sehari setelah ketua hak asasi manusia PBB Volker Türk menyatakan kekhawatiran usai laporan pengusiran sewenang-wenang terhadap warga negara Afghanistan dari Pakistan.

Mereka mendapatkan pecehan, termasuk penganiayaan, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, serta penghancuran harta benda dan barang-barang pribadi hingga pemerasan. Beberapa warga Afghanistan yang kembali mengatakan, telah diganggu oleh pihak berwenang Pakistan yang meminta suap. Salah satu pengungsi yang kembali Zabihullah mengatakan, bahwa dia menghabiskan 28 tahun hidupnya di Pakistan.

Zabihullah mengatakan, polisi Pakistan pekan lalu menggerebek rumah tempatnya tinggal di barat laut dan diminta meninggalkan negara itu. "Polisi menyita uang saya. Saya harus menjual barang-barang rumah tangga saya untuk pulang ke rumah bersama keluarga saya," katanya.

Tapi, para pejabat Pakistan sering mengklaim bahwa warga Afghanistan yang kembali ke kampung halamannya diperlakukan dengan adil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mumtaz Zahra Baloch mengatakan, pemulangan semua orang asing ilegal, termasuk warga Afghanistan, dilakukan dengan cara yang manusiawi. ● ans

Napi Kasus Pembunuhan di Italia Dibebaskan dari Penjara karena Kegemukan

MILAN(IM) - Seorang narapidana kasus pembunuhan di Italia dibebaskan dari penjara hanya karena kegemukan. Pria bernama Dimitri Fricano itu sedang menjalani hukuman penjara 30 tahun karena membunuh pacarnya, Erika, pada 2017 lalu. Hakim memutuskan untuk membebaskan Fricano karena makanan di penjara tidak memungkinkan baginya untuk diet. Pada saat dia dijatuhi hukuman, Fricano memiliki berat 120 kg.

Namun dalam 12 bulan kemudian, beratnya terus bertambah menjadi 200 kg. Dokter mengatakan Fricano memiliki risiko tinggi penyakit jantung. Bahkan dia tidak bisa beraktivitas lagi, melainkan harus dibantu dengan tongkat atau kursi roda.

Oleh karena itu pengadilan memutuskan bahwa Fricano tak bisa lagi menjalani kehidupannya di penjara karena asupan makanan di sana tak menungkkannya untuk diet.

"Dia butuh bantuan yang tidak bisa diberikan di lembaga pemasyarakatan tersebut," demikian keputusan panel hakim, seraya menjelaskan Fricano tidak bisa terus berada di penjara karena kegemukan serta kebiasaan merokok yang membuatnya berisiko meninggal dunia.

Dia akan menjalani tahanan rumah di sebuah kota dekat Biella. Jika kondisinya membaik, dia akan kembali ke penjara. Keputusan itu membuat marah orangtua korban pembunuhan.

Mereka yakin Fricano tidak akan kembali ke penjara lagi. "Tahanan rumah untuk Dimitri? Ini keputusan memalukan. Rasanya seperti mendapat tikaman tepat di jantung. Ini adalah kasus yang jarang terjadi. Tidak disangka bahkan mafia pun tidak menerima perlakuan ini," kata ayah Erika, kepada surat kabar Corriere Della Sera.

Fricano ditangkap karena membunuh Erika setelah terjadi pertengkaran sengit, saat berlibur di Sardinia. Dia awalnya mengatakan Erika dibunuh perampok.

Namun keterangan yang diberikannya berbelit-belit membuat polisi curiga. Setelah itu Fricano mengakui menikahnya kekasihnya 57 kali. Pemicu pertengkaran sebenarnya hal sepele. Fricano tak suka Erika makan di tempat tidur hingga mengotori kasur.

Meski pembunuhan terjadi pada 2017, Fricano baru diseret ke pengadilan pada 2019. Namun vonis hukuman penjara 30 tahun baru dijatuhkan kepadanya pada 2022. Sidang ditunda terkait pandemi Covid-19 yang mengganas di Italia. ● tom

Presiden Austria Digigit Anjing saat Berkunjung ke Moldova

CHISINAU(IM) - Presiden Austria Alexander Van der Bellen sedang apes. Dia digigit anjing peliharaan Presiden Moldova Maia Sandu saat berkunjung ke kediaman dinas pada Kamis (16/11). Meski demikian Van der Bellen tak marah bahkan memberi mainan kepada anjing yang masih kecil itu.

Media Moldova melaporkan, insiden tersebut terjadi saat kedua pemimpin berjalan-jalan di halaman kediaman dinas Sandu. Saat itu Van der Bellen mencoba untuk mengajak main anjing bernama Codrut, namun malah digigit di tangannya.

Sandu kemudian meminta maaf kepada Van der Bellen seraya menjelaskan, anjing itu ketakutan karena banyak orang

di sekitar. Setelah itu Van Der Bellen setelah itu muncul dalam kondisi tangan dipierban. Saat itu dia melanjutkan agenda pertemuan dengan ketua parlemen Moldova. Sementara itu dalam video yang di-posting ke Instagram, Jumat (17/11), Van der Bellen menyampaikan simpati kepada anjing tersebut.

"Setiap orang yang mengenal saya tahu bahwa saya seorang pencinta anjing dan bisa memahami kegembiraannya," katanya, dalam caption.

Dia juga memberi hadiah anjing itu mainan kecil di hari terakhir kunjungannya. Dia juga memastikan insiden itu tak mengganggu agenda pertemuannya di Moldova. Pertemuannya dengan Sandu dan pejabat tinggi lain berjalan baik. ● tom

Gedung Putih: Hamas dan Israel Belum Sepakati Gencatan Senjata

WILMINGTON(IM) - Israel dan Hamas belum mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata sementara, kata juru bicara Gedung Putih pada Sabtu, (19/11) malam. The Washington Post melaporkan sebelumnya pada Sabtu malam bahwa kesepakatan yang ditengahi Qatar antara Israel dan Hamas telah dicapai untuk gencatan senjata lima hari dengan imbalan 50 sandera atau lebih. "Belum ada kesepakatan, tapi kami terus bekerja keras untuk mencapai kesepakatan," kata Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Israel mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk memperluas serangannya terhadap militan Hamas ke Gaza selatan setelah serangan udara menewaskan puluhan warga Palestina, termasuk warga sipil yang dilaporkan berlindung di dua sekolah. ● tom

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MENARA CAPITAL NUSANTARA Tbk.

Dengan ini Direksi PT Menara Capital Nusantara Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar Perseroan maka Panggilan Rapat akan dilakukan dengan cara pemasangan iklan sedikinya pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 29 November 2023.

Yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2023, pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 5 (lima) Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi paling lambat tanggal 24 November 2023.

Jakarta, 20 November 2023
PT MENARA CAPITAL NUSANTARA Tbk.
DIREKSI